

Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta

Laksmi Kusuma Wardani¹

Jurusan Desain Interior, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra Surabaya

ABSTRACT

At the time of Sultan Hamengku Buwana IX, there is a change of government system Keraton Yogyakarta. Keraton as the center of the feudal system of government, turned into a special region, part of the Indonesian republic in democratic governance. Qualitative research with this historical approach, using descriptive analysis method to find the Sultan Hamengku Buwana IX's view related with social cultural and changes Keraton Yogyakarta existence. The research result will show that Sultan Hamengku Buwana IX's had many involvements in the struggle of Indonesian Republic, making changes in the keraton government system and develop the keraton function as the center of culture, tourism and education. The existence of keraton had change its function as the center of the king governance as the central of the Javanese art and culture which are sacred and high culture. Changes refer to thingking about the concept oh the Sultan's throne to the people, which prioritizes the development of the wider community. That change is the success of the Sultan in combining tradisional and modern thinking.

Key words: *Sultan Hamengku Buwana IX, Social Cultural, Keraton Yogyakarta*

ABSTRAK

Pada masa Sultan Hamengku Buwana IX, terjadi perubahan sistem pemerintahan Keraton Yogyakarta. Keraton sebagai pusat kerajaan dengan sistem pemerintahan feodal, berubah menjadi Daerah Istimewa, bagian dari Republik Indonesia dalam pemerintahan demokrasi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan historis ini, menggunakan metode analisis deskriptif untuk menemukan pandangan sosio-kultural Sultan Hamengku Buwana IX dan perubahan eksistensi Keraton Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultan Hamengku Buwana IX banyak terlibat dalam perjuangan NKRI, melakukan perubahan sistem pemerintahan keraton dan mengembangkan fungsi keraton sebagai pusat kebudayaan, pariwisata dan pendidikan. Eksistensi keraton berubah dari fungsinya sebagai pusat kekuasaan raja menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa yang sakral dan *adiluhung*. Perubahan yang terjadi mengacu pada pemikiran Sultan mengenai konsep tahta untuk rakyat, yang memprioritaskan pembangunan masyarakat luas. Perubahan itu, merupakan keberhasilan Sultan dalam memadukan pemikiran tradisional dan modern.

Kata kunci: *Sultan Hamengku Buwana IX, Sosio-Kultural, Keraton Yogyakarta*

Keraton Yogyakarta merupakan pusat kerajaan, pusat budaya, sekaligus tempat tinggal raja yang dikukuhkan sebagai figur penerima *pulung*, *ndaru*, *cahya nurbuat*, atau *wahyu Ilahi*, untuk menyampaikan kebajikan Allah kepada umat manusia di muka bumi. Kepercayaan Jawa menganggap bahwa seorang raja adalah subjek yang mendapat *pulung*, memiliki kekuatan *Ilahi* dan diibaratkan sebagai raja-dewa yang bertahta atas alam semesta

¹Korespondensi: Laksmi Kusuma Wardani. Jurusan Desain Interior, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra. Siwalankerto 142-144, Surabaya, 60236, Indonesia. Telepon. 031-8439040. E-mail: laksmi@peter.petra.ac.id

(Magnis-Suseno 2001:103). Sultan sebagai Sang *Sinuwun* (Sinuhun) adalah lembaga, tempat segenap aparat dan *kawula* mengharapkan anugerah. Sultan juga berperan sebagai institusi, yakni tempat orang berguru sebagai Sang Arif Bijaksana, tempat memperoleh pendidikan, pembinaan, dan pengemblengan watak *berbudi bawa leksana* (mengutamakan kebaikan), *ambeg adil para marta* (berlaku adil kepada siapapun), serta tempat melakukan penghayatan hidup yang berorientasi pada etika Jawa dengan menjunjung rasa hormat, harmoni, *sabar*, *legawa* (terbuka menerima kenyataan sebagaimana yang terjadi), dan *memayu hayuning buwana* (melestarikan keindahan dunia) (Subanar 2006:66).

Pada masa Sultan Hamengku Buwana IX (terlahir dengan nama G.R.M. Dorojatun), dengan mengamati pemikiran Sultan tentang pemerintahan berdasarkan tradisi dan birokrasi modern, menunjukkan kemampuannya yang tinggi untuk memadukan kedua pemikiran tersebut dengan menyesuaikan pemikiran dan kehendaknya sebagai raja dengan pemikiran dan kehendak rakyat (Suwarno 1994:87). Kebijakan-kebijakan di keraton pasca pendudukan Jepang telah membawa banyak perubahan yang menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya berkenaan dengan perubahan Yogyakarta yang semula berdasarkan sistem pemerintahan feodal di bawah pengawasan penguasa kolonial Belanda dan fasisme Jepang, berubah menjadi bagian dari kekuasaan republik dalam pemerintahan demokrasi. Apabila semula keraton berfungsi sebagai pusat kekuasaan yang menduduki posisi penting pada generasi Mataram dan penerusnya, maka pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwana IX telah berubah menjadi Daerah Istimewa sebagai bagian dari NKRI (Mochtar dalam Atmakusumah 1982: 64-65).

Wawasan Sultan Hamengku Buwana IX yang modern dan demokratis membawa perubahan pada fungsi keraton yang dulunya bersifat tertutup menjadi terbuka, yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya keterbukaan keraton bagi dunia pendidikan dan pariwisata. Hal itu merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa keraton telah mengalami transformasi dan perubahan paradigma yang bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemikiran modern Sultan itu, masih memperlihatkan pentingnya warisan budaya bangsa, yang hingga saat itu dipandang tetap memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat, terutama jiwa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara yang perlu ditransformasikan kepada generasi penerus.

Perjalanan sejarah mencatat bahwa Sultan Hamengku Buwana IX melewati kehidupan di zaman Belanda, Jepang, kemerdekaan dan pembangunan. Di tengah zaman-zaman itu, Sultan menjadi orang penting yang menjadi tumpuan rakyat. Peran dan pemikiran Sultan di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh, khususnya perubahan pemikirannya yang membawa dampak perubahan eksistensi dan fungsi Keraton Yogyakarta yang menyiratkan tumbuhnya kesadaran penguasa keraton sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Fakta historis dan nilai budaya keraton diuraikan secara deskriptif, terutama temuan berbagai pandangan Sultan Hamengku Buwana IX dan perubahan fundamental yang terjadi di lingkungan Keraton Yogyakarta. Metode pendekatan historis digunakan untuk menggali lebih jauh pandangan Sultan Hamengku Buwana IX dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta perubahan eksistensi dan fungsi Keraton Yogyakarta. Kausalitas historis menentukan faktor-faktor yang bernilai umum dan universal. Kajian historis menjelaskan kejadian-kejadian yang telah pasti dan kongkret sebagai akibat-akibat dari sebab-sebab kongkret tertentu. Kenyataan empiris merupakan hasil objektivitas pengetahuan yang dibatasi oleh nilai-nilai yang ditentukan oleh kebudayaan. Nilai-nilai melekat pada benda-benda atau objek alamiah (Kartodirdjo 1982:58,59).

Metode pengumpulan data ditempuh melalui studi pustaka untuk menemukan data mengenai pandangan-pandangan Sultan Hamengku Buwana IX. Dokumentasi visual dan

observasi di lapangan dilakukan untuk mencari data faktual tentang bangunan Keraton Yogyakarta, sedangkan wawancara dengan komunitas pendukungnya, dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai berbagai perubahan eksistensi dan fungsi Keraton Yogyakarta. Hasil klasifikasi data dianalisis secara kritis, *open-ended*, induktif, dan bersifat longgar (Endraswara 2006:175). Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi analisis ilmiah tentang perubahan ideologi yang berdampak pada perubahan karya seni tradisi, untuk kemudian menjadi sumber gagasan pengembangan yang berlandaskan nilai luhur dan jati diri budaya bangsa.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah masa lalu Yogyakarta menceritakan terjadinya perpecahan pada masa pemerintahan sementara Inggris (1812-1816) dipimpin Gubernur Thomas Stamford Raffles, yakni dengan pemberian hadiah kepada pangeran Natakusuma yang kemudian memakai gelar Pakualam. Ketika Belanda kembali tahun 1816, kerajaan Mataram pecah menjadi empat, yaitu Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta dan Pakualaman. Kemudian kekuasaan Belanda pada tahun 1942 runtuh akibat serbuan Jepang. Pergantian penjajah kolonial tidaklah mengakibatkan perubahan-perubahan struktural dan politik yang berarti bagi Keraton Yogyakarta. Kolonialisme Belanda semata-mata hanya digantikan oleh pemerintahan militer Jepang. Sejumlah perubahan besar baru terjadi tatkala Jepang menyerah karena revolusi nasional Indonesia dan ketika Sultan Hamengku Buwana IX dan Pakualam VII menyatakan kekuasaannya masuk dalam wilayah RI. Berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai pandangan Sultan Hamengku Buwana IX dibidang politik, sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pandangan Politik dan Sistem Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana IX

Pemikiran Sultan yang menjadi dasar perubahan pemerintahan Yogyakarta dimulai dengan peristiwa penting yang terjadi selama tiga hari di Batavia, tepatnya di Hotel des Indes tanggal 18-21 Oktober 1939 yakni penyerahan pusaka keraton Kyahi Jaka Piturun dari Sultan Hamengku Buwana VIII kepada Dorodjatun. Keris pusaka yang sampai sekarang tersimpan di keraton ini, selalu diserahkan oleh raja kepada seseorang yang diinginkannya menjadi putra mahkota yang kelak akan menjadi Sultan Keraton Yogyakarta (Mochtar dalam Atmakusumah 1982:37).

Penyerahan pusaka Kyahi Jaka Piturun kepada Dorodjatun berarti penyerahan tahta keraton kepada Sultan yang baru. Langkah awal yang dilakukan Dorodjatun yakni mengumpulkan semua kerabat keraton, terutama para putra Sultan Hamengku Buwana VII dan VIII. Secara langsung, ia menanyakan kepada mereka siapa di antara mereka yang mempunyai keinginan untuk menjadi Sultan Hamengku Buwana IX. Apabila semua gagasan diajukan secara terang dan dibicarakan bersama, kerabat keraton akan mempunyai sikap yang kompak. Semua keluarga ternyata sepakat mendukung Dorodjatun menjadi Sultan Hamengku Buwana IX (Mochtar dalam Atmakusumah 1982:41). Sikap Dorodjatun ini menunjukkan musyawarah penting untuk mendapatkan keputusan yang didukung semua pihak. Penjajah tidak akan mudah mengadu-domba keluarga keraton.

Dorodjatun setelah dinobatkan menjadi raja bergelar "*Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah IX*". Gelar ini memiliki arti bahwa Sultan adalah penguasa di dunia. *Senopati Ing Ngalogo* memiliki arti bahwa Sultan adalah panglima angkatan perang pada saat terjadi peperangan, Sultan mempunyai kekuasaan dalam menentukan perdamaian atau peperangan. Sultan adalah *Abdurrahman Sayidin Panatagama*, yang berarti merupakan pimpinan agama dan wakil Tuhan di muka bumi (Khairuddin 1995:35). Sultan memiliki kekuasaan militer, politik, dan agama yang absolut.

Berbekal pengetahuan yang didapat di Holand dan kemampuan bahasa Belanda yang meyakinkan, Dorodjatun melakukan perdebatan politik dengan Gubernur Dr. Lucien Adam

selama empat bulan sebelum penobatan Sultan. Hingga akhirnya, ditanda-tangani Dorodjatun setelah mendapat bisikan gaib dari nenek moyangnya. Bisikan dalam bahasa Jawa itu, isinya merupakan petunjuk berharga, yakni: “*Tolé, tèkena waé, Landa bakal lunga saka bumi kéné*” (“Nak, tanda tangani saja, Belanda akan pergi dari bumi sini”). Kontrak politik yang terdiri dari 17 bab berisi 59 pasal itu, tanpa lebih dulu diperiksa dan dibaca, langsung ditandatangani Dorodjatun pada saat upacara di tratag *Prabayeksa*. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Sultan masih mempertahankan tradisi ditengah arus berkembangnya budaya modern serta keinginannya untuk melakukan perubahan. Perubahan pertama tampak dengan diperkenalkannya dua orang pribumi yang berkecimpung di dunia surat kabar untuk menghadiri penobatan Sultan. Biasanya undangan hanya ditujukan untuk pers Belanda (Mochtar dalam Atmakusumah 1982:44,49-50). Kecuali itu, keinginan Sultan untuk mengadakan perubahan tampak pula dalam pidatonya yang terdengar progresif ketika dinobatkan menjadi raja 18 Maret 1940 (hari Senin Pon tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871), yakni:

“Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerjasama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tidak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya” (Mochtar dalam Atmakusumah 1982:53).

Pernyataan tersebut menunjukkan Sultan dapat mempersatukan dua dunia dalam dirinya dengan berhasil. Di dunia yang satu, ia adalah raja yang menjunjung tinggi adat keraton dan pemegang gelar dalam deretan silsilah raja-raja Mataram yang disembah *kawulanya*. Di dunia yang kedua, ia adalah pria modern yang ingin mengabdikan pada nusa dan bangsa, tegas, santai, sederhana, berpikiran modern, dan selektif terhadap tradisi yang menghambat kemajuan (Mochtar dalam Atmakusumah 1982:19). Kecuali itu, pidato pengukuhan Dorodjatun disiarkan dalam radio 12 Desember 1941 pukul 18.30, dua setengah bulan sebelum Jepang memasuki Yogyakarta. Pidato itu menjelaskan tentang kehidupan orang Jawa yang sesuai dengan sifat Dewa Baruna dalam *Asthabrata*, yaitu mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan rakyat dengan dasar cinta kepada sesama.

Sultan juga menekankan bahwa hanya orang yang mempunyai wewenang untuk memerintahlah yang harus ditaati. Pemikiran ini menunjuk pada otoritas pemerintahan yang mantap berdasarkan legitimasi tradisional yang menghasilkan ketentraman masyarakat. Kepercayaan kepada pemerintah diulang lagi, namun di dalamnya dimasukkan konsep birokrasi pemerintahan baru yang fungsinya melayani rakyat (Suwarno 1994:83). Sikap Sultan yang memperhatikan rakyat Yogyakarta antara lain dengan ditolaknya mentah-mentah untuk ikut Belanda menyingkir ke luar Hindia Belanda yaitu Australia apabila Jepang datang.

“Apapun yang akan terjadi, saya tak akan meninggalkan Yogya. Justru bila bahaya memuncak, saya wajib berada di tempat demi keselamatan Keraton dan rakyat”. Kalau Belanda mengajak saya, biasanya sekaligus mereka mengajak tiga orang raja lainnya di Jawa Tengah yaitu Sunan Solo, Paku Alam dan Mangkunegara. Ketika itu saya diajak ke Australia, bukan ke Bandung. Lalu saya jawab: Buat apa saya pergi ke Australia? Apapun yang terjadi, tempat saya adalah di Yogya (Suwarno 1994:56,58).

Tekad Sultan untuk melepaskan Yogyakarta dari penjajahan melalui perubahan birokrasi pemerintahan bertahan terus sampai Jepang menduduki Yogyakarta. Kemampuannya untuk melakukan perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi yang diciptakan Jepang mendapat dukungan dari rakyat Yogyakarta. Hasil belajarnya selama di Leiden diterapkan dengan memadukan unsur-unsur pemerintahan tradisional dengan

birokrasi modern. Perubahan fundamental terjadi setelah diberhentikannya KPH Danurejo VIII dari jabatan *Pepatih Dalem* 1 Agustus 1945, serta pernyataan Sultan untuk bergabung dengan NKRI 18 Agustus 1945. Sikap politik Sultan dalam amanat Seripaduka Inggang Sinuwun Kandjeng Sultan Jogjakarta 5 September 1945, yakni :

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat, menyatakan: 1) Bahwa Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.; 2) Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya; 3) Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat dengan Pemerintahan Pusat Negara republik Indonesia bersifat langsung dan Kami bertanggung-djawab atas Negeri Kami langsung kepada Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat mengindahkan amanat Kami ini (Atmakusumah 1982:301).

Kebijakan-kebijakan Sultan Hamengku Buwana IX yang modern dan demokratis akhirnya membawa perubahan pada status kota Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa. Kota Yogyakarta setelah itu menjadi kotapraja yang bersifat otonom (sejak keluar UU no.17 tahun 1947), dengan hadirnya DPR Haminte Kota, Dewan Pemerintahan Kota dan walikota, dan ditetapkannya Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa (Goenawan & Darto Harnoko 1993:25-27). Pada dasarnya sikap dan kebijakan politik yang dimiliki oleh Sultan untuk bergabung dengan RI membuahkan suatu konsolidasi kekuatan politik nasional. Selain itu, pemindahan ibukota RI ke Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 1946 merupakan bukti dari ketegasan komitmen Sultan Hamengku Buwana IX.

Pandangan Sultan Hamengku Buwana IX Dibidang Sosial dan Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat ningrat selalu dikaitkan dengan permasalahan tanah. Tanah menunjuk pada seseorang akan status tertentu, begitu juga semua aspek kehidupan yang melingkupi perorangan atau kelompok selalu berhubungan dengan pemilihan tanah dan hasil kerja atas tanah. Manifestasi dari sistem pemerintahan feodal merupakan suatu bentuk atas kekuasaan dan kekuatan dalam pertuanan tanah yang menuntut kewajiban menyerahkan hasil daerah, kerja rodi untuk para penguasa (Goenawan & Darto Harnoko 1993:34). Pemberian lahan beserta bangunan milik keraton merupakan kewenangan kerajaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang berjasa. Terhadap tanah-tanah kerajaan, Sultan memiliki kewenangan untuk mempergunakannya bagi kepentingan keraton atau kepentingan pribadi. Sultan memiliki hak memakai, mencabut hak-hak dari pemegangnya, atau memberikan kepada pihak lain. Siapapun yang ingin memanfaatkan tanah akan berusaha mendapatkan izin sultan dengan ketentuan para pengelola tanah membayar pajak dan melakukan kerja wajib (Soemardjan 1991). Pada masa Sultan Hamengku Buwana VIII, sistem penguasaan tanah masih berlaku, namun para bupati dari penjuru negeri tidak lagi membawa hasil bumi untuk dipersembahkan kepada Sultan. Sultan memiliki banyak dana dengan berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan swasta.

Kehidupan ekonomi pada masa Sultan Hamengku Buwana IX mengalami perubahan besar. Pembangunan di bidang ekonomi sudah dirintisnya sejak pendudukan Jepang, yakni Sultan berhasil mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan irigasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan dan orde lama, Sultan banyak mengeluarkan dana untuk membantu keperluan perjuangan RI. Pada masa orde baru, Sultan menjabat sebagai menteri ekonomi dan keuangan, dengan sasaran rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian rakyat, rehabilitasi prasarana dan sarana transformasi serta komunikasi, kapasitas produksi dan sebagainya, membawa proses pembangunan dalam Program Pelita (Nurtjahjo 1994:4). Sultan

membentuk Yayasan Kredit Tani Indonesia (Yakti). Perkembangan ekonomi di Yogyakarta mengalami kemajuan tahun 1980an. Tingginya angka kemajuan ini disebabkan karena propinsi ini berpenduduk padat dan miskin kekayaan alam. Namun dengan peran Sultan sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menjalankan pembangunan pertanian dan pedesaan membawa kemakmuran Yogyakarta nomor tiga setelah DKI Jakarta dan Sumatra Barat. Pembangunan ini, berdasarkan efisiensi dari potensi daerah yang sudah ada, dengan ciri pembangunan desentralistik, dimana pola umum pembangunan nasional tidak sepenuhnya diikuti (Nurtjahjo 1994:11-12).

Di bidang pendidikan, Sultan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membiarkan rakyat mendirikan rumah dan hidup di dalam tembok keraton secara *magersari*. Pendidikan dengan sifat kolonial dihapuskan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, yakni mendidik kesederhanaan, hemat, bertanggungjawab, mandiri dan menanamkan rasa kebangsaan dan mempertinggi kebudayaan serta kesenian. Selain itu, Sultan mendorong berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM). Mengenai tempat universitas itu bukan di luar kota, tetapi tepat di bagian depan istananya yakni di *Pagelaran* dan *Sitihinggil*. Saat ini, banyak tanah milik keraton yang dipergunakan untuk pendirian sekolah-sekolah. Yogyakarta kemudian berkembang menjadi kota pelajar karena ada berdirinya Tamanan, *Kweekschool*, *Thechnische School*, AMS A, dan UGM. Perkembangan pendidikan ini memunculkan benih-benih pergerakan nasional seperti Kongres *Jong Java*, Kongres Serikat Islam, Kongres Boedi Oetomo, Kongres Indonesia Muda, Kongres Taman Siswo, Kongres Wanita serta Kongres Muhammadiyah. Pendidikan menjadi motor penggerak yang membawa perubahan sosial dan mobilitas sosial di Yogyakarta.

Di bidang pembangunan sosial, Sultan tidak mendorong timbulnya arus urbanisasi dan menekankan pembangunan yang mengandalkan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pembangunan tersebut ialah mengutamakan pembangunan manusia seutuhnya, memacu status kesehatan dan pendidikan yang baik. Pemberian otonomi yang besar terhadap daerah ini pada akhirnya merupakan faktor yang juga berperan terhadap pembangunan.

Dibidang keagamaan, Sultan sebagai *Khalifatullah* dan *Panatagama* tidak membeda-bedakan agama dalam kehidupannya sebagai negarawan, raja dan warga negara Indonesia. Sultan sebagai raja, tetap melestarikan tradisi sekaten sebagai sarana dakwah Islam sejak masa Sunan Kalijaga. Sultan mengangkat penghulu keraton, mendirikan Masjid Sulthani di empat penjuru wilayah Yogyakarta, dan menempatkan takmir masjid yang masih termasuk kerabat keraton di masing-masing masjid tersebut (Kedaultan Rakyat 1988:12). Sebagai raja yang bijaksana, Sultan menjadi *pengayom* dan *pengayem* bagi kehidupan masyarakat beragama. Toleransi dijaga agar perbedaan agama membawa kedamaian dan kerukunan.

Peranan Sultan Hamengku Buwana IX di bidang sosial cukup banyak seperti olahraga, pramuka dan pariwisata. Dari sejak kecil, Sultan menyukai olahraga. Kegiatan di bidang olahraga lebih intensif dilakukan sesudah Sultan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden 23 Maret 1973. Pusat olahraga pertama dibentuk Sultan tahun 1947 yakni Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PERI), untuk tingkat nasional dibentuk Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) dengan ketua Mr. Widodo Sastrodiningrat. Pada tahun 1948, Sultan mengadakan Pekan Olahraga Republik Indonesia I (PORI I) di Stadion Sriwedari Surakarta.

Di masa pemerintahan Orde Baru, keterlibatannya dibidang olahraga Asean Games berlanjut hingga usia tua, bahkan Sultan menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) tahun 1967. Kedudukan Sultan sebagai duta politik, olahraga, seni, dan budaya selalu mengandung misi perdamaian dunia. Dunia internasional mengakui bahwa peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara sangat besar. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Sultan mendapat hadiah perdamaian Kajima (*Peace Award Kajima*), yaitu hadiah perdamaian internasional versi Kajima Jepang khusus untuk orang-orang Asia dan Afrika (Nurtjahjo 1994:36). Perannya menggalang

perdamaian, dilanjutkan dengan keterlibatannya sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968-1974), yang berhasil menggabungkan 70 organisasi kepanduan yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sultan mendapat penghargaan sebagai Pembina Pramuka Ahli. Di tingkat internasional, Sultan memperoleh penghargaan *Bronze Wolf Award* dan *Boy Scout of America* (Nurtjahjo 1994:16).

Pandangan Sultan Hamengku Buwana IX Dibidang Budaya

Peranan Sultan Hamengku Buwana IX dibidang budaya tidak dapat lepas dari kedudukannya sebagai seorang raja yang secara otomatis menjadi pelindung budaya Jawa. Peran Sultan dalam pengembangan budaya Jawa meliputi berbagai fungsi yang terdapat di dalamnya. Sultan mempunyai peranan sebagai pelaku seni, pembina seni, pencipta seni dan pemikir seni (Sudyarsana 1988:6). Sebagai pelaku seni, sejak kecil Sultan Hamengku Buwana IX sudah menerima pendidikan dan pengajaran seni tari Jawa tradisional. Dalam menarikan suatu jenis tarian maka biasanya Sultan berperan sebagai Gatotkaca. Sebagai seorang pembina seni, Sultan melakukan berbagai penyederhanaan dalam bidang kesenian. Akan tetapi, penyederhanaan ini tidak berarti memundurkan kualitas pengembangan seni di Keraton Yogyakarta (Nurtjahjo 1994:19). Sultan Hamengku Buwana IX menciptakan beberapa tarian, antara lain Bedoyo Manten dan Bekso Golek Menak yang kemunculan idenya dipengaruhi oleh wayang dan memiliki unsur-unsur silat Minangkabau. Melestarikan dan membakukan tari adalah sebagian dari sejumlah keinginan Sultan dalam memberi warna baru bagi Keraton Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa keraton menjadi satu pusat kebudayaan yang hidup dan menjadi acuan dinamis untuk kebudayaan dan kesenian. Museum pribadi Sultan Hamengku Buwana IX, Museum Keraton, misalnya, adalah aktualisasi perwujudan keraton sebagai pusat kebudayaan Jawa yang benar-benar hidup (Margantoro 1999:86).

Sebagai pewaris budaya Jawa yang *adiluhung*, Sultan tidak ingin menghapus kepercayaan masyarakat yang berbau mistis. Tradisi labuhan dulu dikaitkan dengan upacara memperingati hari penobatan Sultan. Prosesi ini adalah membuang sesaji untuk Nyi Roro Kidul, yang dipercaya masyarakat sebagai istri para raja Jawa. Di masa Sultan Hamengku Buwana IX, proses itu tetap dipertahankan. Upacara ini dijadikan peringatan kelahiran Sultan, yakni 25 Bakda Maulud dalam kalender Jawa. Sedangkan arti sesaji itu menjadi sarana pernyataan syukur. Upacara lain di keraton tetap berjalan sebagaimana biasa. Estetika dan keindahan bangunan keraton tetap dijaga termasuk melestarikan seni budayanya. Gelar-gelar pun masih tetap diberikan, namun terbatas untuk lingkungan keraton dan bukan mengobrol gelar untuk orang luar keraton (Yayasan Karyawan Tempo 1988:29). Tata cara berpakaian, mengenakan keris dan lain sebagainya masih dihormati dan dilestarikan. Selain hal tersebut di atas, Sultan juga mengadakan perubahan bahasa yang digunakan maupun sikap mental birokrat yang menjadi pendukung perubahan birokrasi pemerintahan. Sultan memerintahkan R. Amir Noto untuk memberi pelajaran bahasa Indonesia.

Perubahan Eksistensi dan Fungsi Keraton Yogyakarta

Pandangan dan sikap Sultan Hamengku Buwana IX dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya membawa perubahan wujud kebudayaan berupa ide gagasan mengenai sistem pemerintahan feodal berubah menjadi demokrasi. Keterlibatan Sultan dalam perjuangan kemerdekaan dan keputusannya memasukan keraton dalam kedaulatan RI memberi contoh kepada rakyat mengenai jiwa nasionalisme. Sultan mengubah dan menyederhanakan sistem pemerintahan dengan mengambil alih fungsi *Patih Dalem*, dan membentuk Dewan Kementrian, membentuk panitia pembantu pamong praja sebagai badan pertimbangan, dan mengadakan ujian saringan bagi mereka yang ingin menjadi pegawai keraton. Tindakan Sultan ini menunjukkan bahwa masyarakat luas boleh mengambil bagian dalam pemerintahan keraton. Hal ini membuat gerak masyarakat ningrat menjadi terbatas. Masyarakat ningrat diharapkan berbaur dengan masyarakat luas dan tidak ada lagi hak

istimewa dan perlakuan hukum istimewa yang diatur seperti dalam perjanjian dengan Belanda sebelumnya.

Usaha yang dilakukan Sultan Hamengku Buwana IX untuk menghemat biaya pengeluaran keraton yakni dengan menyederhanakan sebagian upacara-upacara ritual keraton, sebagian yang lain tetap dijaga keasliannya, terutama untuk tradisi keraton yang fundamental. Sultan mengubah gagasan lama yang dirasa tidak sejalan dengan semangat budaya baru yang berwawasan nasional. Misalnya, menggunakan bahasa Jawa Bagongan di lingkungan keraton dan bahasa Indonesia dalam urusan kenegaraan. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kesadaran nasionalisme berbangsa dan bernegara, dengan tetap menjaga keluhuran nilai budaya Jawa.

Keraton berfungsi sebagai ruang hunian Sultan dan keluarganya. Bangunan Keraton Yogyakarta yang dirancang Sultan Hamengku Buwana I memuat makna simbolik sebagai tuntunan hidup agar manusia melaksanakan sesuai apa yang dimaksud dibalik nama-nama bangunan. Pengaturan bangunan maupun tumbuh-tumbuhan disesuaikan dengan kepentingan pada masa itu. Pada masa Sultan Hamengku Buwana IX, kearifan nilai budaya yang melekat pada bangunan keraton dan isinya tetap dijaga. Sultan mengadakan perubahan terhadap fungsi alun-alun utara. Alun-alun dibebaskan dari keramaian yang tak ada kaitannya dengan keraton. Pasar malam sekatenan sejak 1988 tidak lagi menggunakan alun-alun utara. Kios-kios berdiri di tepi jalan raya di luar alun-alun. Sekatenan itu sendiri sebagai upacara adat keraton tetap menggunakan alun-alun. Sultan ingin mengajak rakyat agar mengenang tradisi masa lalu yaitu *pepe*, rakyat berjemur di alun-alun untuk menyampaikan protes kepada sang raja. Keinginan Sultan dalam kaitan pembenahan keraton ini memang menyeluruh, termasuk mengembalikan fungsi tembok keraton yang dikenal dengan benteng keraton (Yayasan Karyawan Tempo 1988:30). Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Sultan memperhatikan kesinambungan nilai budaya tradisi, selain juga membawa pembaruan yang membangun bagi rakyat.

Sultan terlibat dalam pendirian UGM pada tahun 1946. Perannya antara lain dengan diijinkannya *Pagelaran* untuk proses belajar mengajar UGM. *Pagelaran* merupakan sebuah bangsal terbuka yang terletak di sisi selatan alun-alun utara. Di tempat ini dahulunya digunakan patih kerajaan dan para bupati beserta bawahannya duduk menghadap Sultan. Pada pintu gerbang *Pagelaran* terdapat ragam hias berupa relief dengan candrasengkala *Panca Gana Salira Tunggal*, yang berarti tahun 1865 Jawa atau tahun 1938 Masehi, yaitu tahun disempurnakannya bangunan ini pada masa Sultan Hamengku Buwana VIII. Keraton yang dahulu merupakan kompleks bangunan privat, kini terbuka untuk peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sikap ini kemudian diikuti oleh para bangsawan dengan menyediakan rumah tinggal mereka untuk menunjang peningkatan pendidikan rakyat. Pendidikan tidak hanya untuk masyarakat ningrat saja, tapi seluruh lapisan masyarakat.

Tata ruang Keraton Yogyakarta merupakan wujud ekspresi estetika Sultan Hamengku Buwana I dan para penerusnya. Sultan Hamengku Buwana IX berusaha melestarikan dan mengembangkan, menyesuaikan kebutuhan fungsional yang mengedepankan kepentingan rakyat. Nilai-nilai luhur dalam ujud simbol-simbol bangunan keraton mengandung makna edukatif mengenai hubungan keseimbangan *kawula* (rakyat) dan *gusti* (raja) (Daliman 2001:19). Sultan Hamengku Buwana IX sebagai raja berperan membimbing proses pembentukan tata kehidupan sosial tradisional menuju kehidupan modern dengan tetap berpegang pada *hamangku*, *hamêngku* dan *hamêngkoni jagat*. "*Hamangku* berkait dengan watak yang seharusnya dimiliki penguasa Jawa, yakni watak *berbudi bawa leksana*. Dengan *hamangku*, penguasa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ingin lebih banyak memberi daripada menerima, lebih-lebih terhadap mereka yang berkekurangan, terbelakang dan menderita. *Hamengku* berkaitan dengan watak *ambeg adil paramarta*. Dengan *hamengku*, penguasa Keraton ingin *ngemong*, mengayomi dan melindungi siapapun, tanpa membedakan golongan, keyakinan atau agama. *Hamengkoni* berkaitan dengan watak *ing ngarsa sung tulada*. Dengan *hamengkoni*, penguasa

Keraton Yogyakarta ingin menjadi panutan yang patut diteladani, sanggup berada di depan dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan seorang penguasa yang *gung binathara* (Sindhunata dalam Sri Sultan Hamengku Buwana X 1999:8).

Sultan Hamengku Buwana IX sebagai pelindung pengembangan seni budaya keraton, sangat menyadari pentingnya pelestarian warisan budaya Jawa. Atas dasar itu, keraton berubah fungsi menjadi obyek wisata rakyat. Di *Sitihinggil* yang sekarang terbuka untuk umum misalnya, terdapat dua bangunan permanen yaitu bangsal *Manguntur Tangkil* yang dahulunya berfungsi sebagai tempat Sultan *sinewaka* dan *Bangsal Witana* sebagai tempat meletakkan pusaka-pusaka keraton selama upacara garebeg berlangsung. Hal ini menunjukkan fokus ritual dimasa lalu yakni yang berkuasa adalah Sultan dan pusaka-pusaknya. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata, tratag *Sitihinggil* dan *Pagelaran* yang dahulunya berupa bangunan semi permanen, diubah menjadi permanen. Adapun *Bangsal Witana* sekarang ini beralih fungsi menjadi ruang pameran berupa diorama suasana upacara garebeg. Bangunan *Sitihinggil*, *Kemandungan*, *Sri Manganti*, dan pelataran *Kedhaton*, saat ini menjadi ruang terbuka yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata. Pelataran *Kedhaton* sebagai pusat Keraton Yogyakarta yang dahulu privat, saat ini menjadi ruang publik terbatas, dalam arti beberapa bangunan utama yang sakral tetap tertutup untuk umum. Kesemuanya itu, menunjukkan peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan, sehingga keraton tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, tapi pusat pengembangan seni dan budaya.

Simpulan

Perubahan sosio-kultural di Keraton Yogyakarta mencakup perubahan dalam wujud pemikiran/pandangan atau ide yang diimplementasikan secara tegas dengan sikap demokrasi Sultan Hamengku Buwana IX untuk bergabung dengan NKRI, berdampak pada artefak bangunan keraton yang terbuka untuk rakyat dan berfungsi sebagai fasilitas pendidikan dan pariwisata. Sultan Hamengku Buwana IX banyak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan RII, melakukan perubahan sistem pemerintahan keraton, dan pengembangan fungsi keraton sebagai pusat kebudayaan. Eksistensi keraton berubah dari fungsinya sebagai pusat kekuasaan raja menjadi pusat pengembangan seni, budaya, dan pariwisata. Sultan Hamengku Buwana IX menghargai tradisi dan ujud budaya yang diciptakan oleh leluhurnya, sehingga Keraton Yogyakarta tetap difungsikan sebagai pusat kebudayaan Jawa yang sakral dan *adiluhung*. Kesemuanya itu, menunjukkan keberhasilan Sultan Hamengku Buwana IX dalam memadukan pemikiran tradisional dan modern, yang mengacu pada konsep tahta untuk rakyat dan mengedepankan kepentingan pembangunan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Atmakusumah (ed). (1982) Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX. Jakarta: PT. Gramedia. p.301.
- Daliman A (2001) Makna Simbolik Nilai-nilai Kultural Edukatif Bangunan Keraton Yogyakarta: Suatu Analisis Numerologis dan Etimologis. Jurnal Humaniora 8(1): 10-21
- Endraswara S (2006) Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Goenawan R & Darto H (1993) Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DIY Periode Awal Abad 20. Jakarta: Depdikbud.
- Kartodirdjo S (1982) Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kedaulatan Rakyat (1988) Sri Sultan Banyak Berjasa Dalam Pengembangan Agama. Kedaultan Rakyat, 16 Oktober 1988, p.12.
- Khairuddin (1995) Filsafat Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Magnis-Suseno F (2001) Etika Jawa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Margantoro YB, RPA Suryanto S, Baskoro M, Agoes W, dan Ali S (1999) Sri Sultan Hamengku Buwana X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat, Jakarta: Grasindo.
- Nurtjahjo LA (1994) Peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX Pada Masa Orde Baru. Laporan Penelitian. Jakarta: Proyek Penulisan Biografi Pahlawan Nasional, Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Sindhunata (1999) Kata Pengantar. Dalam Sri Sultan Hamengku Buwana X, Bercermin di Kalbu Rakyat. Kanisius: Yogyakarta. p.7-11
- Subanar GB (2006) Manunggaling Kawula-Gusti Dalam Transisi. Dalam: I Wibowo & Herry Priyono (eds). Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno: Sesudah Filsafat. Yogyakarta: Kanisius. 59-86.
- Sudyarsana HK (1988) Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai Seniman dan Pemikir Seni. Kedaulatan Rakyat. 18 Oktober 1988. p.12.
- Soemardjan S (1991) Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwarno (1994) Sultan Hamengku Buwana IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974. Yogyakarta: Kanisius.
- Yayasan Karyawan Tempo (1988) Sri Sultan: Hari-hari Hamengku Buwono IX. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.